

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis bagaimana diplomasi Swedia melalui Feminist Foreign Policy (FFP) berkontribusi dalam mendorong norma kesetaraan gender di Uni Eropa pada periode 2014–2021. Berdasarkan pembahasan mengenai karakteristik FFP, posisi Swedia sebagai *norm entrepreneur*, perkembangan norma kesetaraan gender, pengaruh Swedia terhadap kebijakan UE, serta praktik diplomasi Swedia dalam arena UE, penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi Swedia memiliki kontribusi nyata terhadap penguatan dan pelembagaan norma kesetaraan gender dalam kebijakan eksternal Uni Eropa. Namun, pengaruh tersebut tidak bersifat tunggal, langsung, ataupun menentukan seluruh hasil kebijakan UE. Pengaruh Swedia berlangsung melalui proses diplomasi, persuasi, advokasi, pembentukan dukungan, dan pemanfaatan institusi UE yang kemudian berinteraksi dengan kepentingan negara anggota dan aktor institusional lainnya.

##### 5.1.1 Karakteristik dan Implementasi Diplomasi Feminisme Swedia

Karakteristik diplomasi feminisme Swedia menunjukkan bahwa FFP tidak hanya merupakan identitas kebijakan luar negeri, tetapi juga menjadi kerangka yang memberikan arah terhadap praktik diplomasi Swedia. Pendekatan tersebut dibangun melalui prinsip *rights*, *representation*, dan *resources*, yang kemudian berkembang dengan dimensi *reality* sebagai dasar untuk memastikan bahwa kebijakan mempertimbangkan kondisi nyata dan berbagai bentuk ketimpangan yang dialami perempuan. Dengan kerangka tersebut, Swedia berupaya membawa perspektif gender ke dalam berbagai bidang hubungan luar negeri, termasuk hak asasi manusia, pembangunan, perdamaian dan keamanan, serta kerja sama internasional. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa diplomasi feminisme Swedia bekerja melalui penggabungan antara norma dan instrumen diplomatik. Swedia tidak hanya menyatakan bahwa kesetaraan gender merupakan nilai yang penting, tetapi menggunakan hubungan diplomatik, forum multilateral, kerja sama pembangunan, jaringan internasional, serta keterlibatan dalam institusi regional untuk mempromosikan nilai tersebut. Dengan demikian, karakteristik utama

diplomasi feminisme Swedia terletak pada upaya mengubah prinsip kesetaraan gender menjadi agenda yang dapat dibicarakan, dinegosiasikan, dan dimasukkan ke dalam kebijakan bersama.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa implementasi FFP tidak sepenuhnya bebas dari kontradiksi. Terdapat situasi ketika kepentingan keamanan, ekonomi, atau kepentingan domestik dapat membatasi konsistensi penerapan prinsip feminis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi feminisme tidak dapat dipahami sebagai praktik yang selalu menghasilkan kesesuaian antara norma dan seluruh tindakan negara. Sebaliknya, diplomasi tersebut berlangsung dalam ruang politik yang mempertemukan komitmen normatif dengan kepentingan dan keterbatasan negara. Hal ini penting karena memperlihatkan bahwa kekuatan diplomasi Swedia tidak terletak pada kemampuan untuk menghilangkan konflik kepentingan, tetapi pada kemampuannya untuk terus membawa isu kesetaraan gender ke dalam proses pengambilan keputusan internasional.

### **5.1.2 Swedia sebagai Norm Entrepreneur dalam Mendorong Norma Kesetaraan Gender**

Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa Swedia dapat diposisikan sebagai salah satu *norm entrepreneur* dalam proses penguatan norma kesetaraan gender di Uni Eropa. Posisi tersebut tidak semata-mata muncul karena Swedia merupakan negara pertama yang memperkenalkan FFP pada 2014, tetapi karena Swedia memiliki fondasi kebijakan domestik, pengalaman dalam kesetaraan gender, kredibilitas normatif, kapasitas kelembagaan, serta komitmen politik yang memungkinkan gagasan tersebut dipromosikan ke tingkat regional. Sebagai *norm entrepreneur*, Swedia berupaya membawa kesetaraan gender dari nilai dan pengalaman kebijakan nasional menuju agenda regional UE. FFP menjadi kerangka yang memungkinkan Swedia mengartikulasikan gagasan tersebut secara lebih sistematis. Dalam prosesnya, Swedia tidak menciptakan norma kesetaraan gender dari titik nol karena norma tersebut telah berkembang dalam berbagai rezim internasional, termasuk hak asasi manusia, agenda WPS, dan kebijakan kesetaraan gender. Peran Swedia lebih tepat dipahami sebagai aktor yang memperkuat, memperluas, dan mendorong penerapan norma yang telah berkembang tersebut ke dalam kebijakan eksternal UE.

Dengan demikian, *norm entrepreneurship* Swedia berlangsung melalui proses promosi dan difusi norma, bukan melalui pemaksaan. Swedia harus memperoleh dukungan dari aktor lain, menyesuaikan gagasan dengan institusi UE, membangun legitimasi, serta menggunakan berbagai forum untuk mempertahankan isu gender dalam agenda kebijakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Swedia merupakan hasil dari kemampuan diplomatik untuk membentuk preferensi dan memperluas dukungan terhadap norma, bukan karena Swedia memiliki kekuasaan material yang cukup untuk menentukan kebijakan UE secara sepihak.

### **5.1.3 Perkembangan Norma Kesetaraan Gender dari Norm Emergence Menuju Pelembagaan di UE**

Dengan menggunakan konsep *norm life cycle* Finnemore dan Sikkink, penelitian menemukan bahwa perkembangan norma kesetaraan gender dalam kasus Swedia dapat dipahami melalui proses *norm emergence*, *norm cascade*, dan *proses menuju norm internalization*. Pada tahap *norm emergence*, Swedia memperkenalkan dan mempromosikan FFP sebagai pendekatan yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan luar negeri. Pada tahap ini, Swedia memainkan peran sebagai *norm entrepreneur* dengan mengartikulasikan pentingnya kesetaraan gender dan membawa gagasan tersebut ke berbagai forum internasional dan regional. Selanjutnya, pada tahap *norm cascade*, norma kesetaraan gender memperoleh penerimaan yang lebih luas melalui berbagai kebijakan dan instrumen UE. Perkembangan *EU Strategic Approach to Women, Peace and Security* serta *Gender Action Plan III (GAP III)* menunjukkan bahwa agenda kesetaraan gender semakin memperoleh ruang dalam kebijakan eksternal UE. Pada tahap ini, norma tidak lagi hanya dikaitkan dengan kebijakan nasional Swedia, tetapi mulai menjadi bagian dari kerangka kebijakan regional yang melibatkan institusi dan negara anggota UE.

### **5.1.4 Diplomasi Swedia dalam Mendorong Norma Kesetaraan Gender di Uni Eropa**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa diplomasi menjadi mekanisme utama yang menghubungkan FFP dengan pengaruh Swedia terhadap kebijakan gender UE. Sebagai *norm entrepreneur*, Swedia menggunakan diplomasi untuk membawa dan memperjuangkan norma kesetaraan gender melalui advokasi, persuasi, *agenda-setting*, pembangunan koalisi, serta keterlibatan dalam institusi UE. Diplomasi tersebut dilakukan melalui interaksi dengan negara

anggota, Komisi Eropa, EEAS, dan berbagai forum UE. Salah satu buktinya terlihat dalam proses GAP III, ketika Swedia disebut sebagai salah satu negara yang paling vokal dan bekerja secara intensif dengan Komisi Eropa serta EEAS dalam mendorong agenda gender. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Swedia tidak hanya berupa retorika, tetapi juga melalui keterlibatan diplomatik dalam proses kebijakan.

Pengaruh tersebut juga terlihat dalam penguatan agenda *Women, Peace and Security* (WPS), khususnya melalui dorongan Swedia terhadap integrasi perspektif gender dalam kebijakan perdamaian, keamanan, dan tindakan eksternal UE. Dengan demikian, diplomasi Swedia berperan dalam memperluas penerapan norma kesetaraan gender dari tingkat nasional ke tingkat regional. Oleh karena itu, pengaruh Swedia tidak dapat dipahami sebagai tindakan sepihak yang menentukan kebijakan UE. Swedia merupakan salah satu aktor yang berkontribusi melalui diplomasi normatif, dengan memanfaatkan reputasi, jaringan, persuasi, dan institusi UE untuk membangun dukungan terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, FFP memberikan arah normatif, sedangkan diplomasi menjadi instrumen yang memungkinkan norma tersebut dipromosikan dan dilembagakan dalam kebijakan Uni Eropa.

#### **5.1.5 Pengaruh Diplomasi Swedia terhadap Kebijakan Kesetaraan Gender Uni Eropa**

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian menemukan bahwa pengaruh diplomasi Swedia terhadap kebijakan kesetaraan gender UE dapat dilihat terutama dalam perluasan, penguatan, dan pelembagaan agenda gender dalam kebijakan eksternal UE. Pengaruh tersebut terlihat dalam berkembangnya agenda WPS, penguatan *Gender Action Plan*, serta GAP III yang menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian penting dari tindakan eksternal UE.

Namun, penelitian tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa seluruh perkembangan tersebut merupakan hasil Swedia secara eksklusif. Kebijakan UE merupakan produk interaksi antara berbagai negara anggota, Komisi Eropa, EEAS, Parlemen Eropa, Dewan UE, serta aktor internasional lainnya. Oleh karena itu, kontribusi Swedia lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu faktor penting dalam proses penguatan norma, terutama melalui kemampuan diplomatiknya untuk menjaga isu gender dalam agenda, membangun dukungan, dan mendorong institusionalisasi norma. Dengan demikian, jawaban terhadap pertanyaan penelitian bukanlah bahwa Swedia secara langsung menentukan kebijakan kesetaraan gender UE, melainkan bahwa Swedia menggunakan diplomasi sebagai mekanisme *norm*

*entrepreneurship* untuk memengaruhi proses pembentukan, penguatan, dan pelembagaan norma kesetaraan gender dalam kebijakan UE. Inilah bentuk pengaruh yang paling dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti penelitian

### 5.1.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Diplomasi Swedia

Keberhasilan diplomasi Swedia didukung oleh beberapa faktor. Pertama, Swedia memiliki reputasi internasional sebagai negara yang memiliki komitmen panjang terhadap kesetaraan gender. Kedua, Swedia memiliki pengalaman dan kapasitas kelembagaan dalam mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan luar negeri. Ketiga, terdapat **solidaritas dan jaringan Nordik** yang dapat memperluas dukungan terhadap agenda tertentu. Keempat, institusi UE sendiri menyediakan berbagai arena yang memungkinkan negara anggota melakukan advokasi, negosiasi, dan pembangunan koalisi.

Namun, diplomasi Swedia juga menghadapi sejumlah hambatan. Perbedaan kepentingan dan orientasi politik negara anggota menyebabkan penerimaan terhadap agenda gender tidak selalu seragam. Resistensi terhadap beberapa kebijakan gender menunjukkan bahwa terdapat batas terhadap kemampuan Swedia untuk menghasilkan perubahan secara langsung. Selain itu, pergantian pemerintahan Swedia pada 2022 dan penghentian penggunaan label FFP menunjukkan bahwa komitmen politik domestik dapat berubah. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa perubahan tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh hasil diplomasi yang telah berkembang di tingkat UE. Hal ini memperlihatkan perbedaan penting antara kebijakan sebagai identitas pemerintah dan norma yang telah masuk ke dalam institusi regional. Ketika norma telah diterjemahkan ke dalam kebijakan dan mekanisme UE, keberadaannya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keberlanjutan satu kebijakan nasional.

### 5.1.7 Kesimpulan Umum

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi Swedia melalui *Feminist Foreign Policy* (FFP) berkontribusi terhadap penguatan norma kesetaraan gender di Uni Eropa. Sebagai *norm entrepreneur*, Swedia menggunakan advokasi, persuasi, pembangunan koalisi, dan keterlibatan dalam institusi UE untuk mempromosikan dan mendorong pelembagaan norma tersebut.

Dengan demikian, alurnya dapat dirumuskan sebagai:

FFP → *Norm Entrepreneur* → Diplomasi → Promosi dan pembangunan dukungan → Penerimaan norma → Pelembagaan dalam kebijakan UE.

Pengaruh Swedia bersifat kontributif, bukan deterministik, karena kebijakan UE dibentuk oleh berbagai aktor dan masih menghadapi perbedaan kepentingan antarnegara anggota. Dengan demikian, kekuatan Swedia terletak pada diplomasi normatif, kredibilitas, jaringan, dan kemampuan memanfaatkan institusi UE untuk mendorong kesetaraan gender dari agenda nasional menjadi norma yang semakin terlembaga di tingkat regional.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Bagi Pengembangan Akademik dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih membuka ruang cukup luas untuk dikembangkan. Penelusuran proses (*process tracing*) yang dipakai di sini terbatas pada dokumen primer UE dan pola pemungutan suara di Dewan Eropa; penelitian berikutnya bisa memperkaya temuan ini lewat wawancara langsung dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Swedia atau staf EEAS, sebagaimana dilakukan Elgström dan Rosén Sundström (2026), untuk menguji lebih jauh apakah pola yang ditemukan di sini bertahan konsisten dari sudut pandang pelaku kebijakan itu sendiri. Penelitian mendatang juga bisa melakukan studi komparatif yang lebih sistematis antara Swedia dengan negara pengadopsi FFP lain seperti Kanada, Prancis, atau Meksiko, untuk melihat apakah pola "norma bertahan meski label dicabut" yang ditemukan di sini juga berlaku pada konteks negara dengan kapasitas dan budaya politik yang berbeda. Selain itu, mengingat penelitian ini menemukan bahwa internalisasi norma di level struktur (kelembagaan UE) tidak otomatis diikuti internalisasi di level unit (negara anggota individual), penelitian lanjutan bisa menelusuri lebih dalam mengapa sejumlah negara anggota tetap resisten meski sudah terikat kebijakan yang sama secara formal.

### 5.2.2 Bagi Swedia dan Uni Eropa

Bagi Swedia, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa substansi kebijakan kesetaraan gender jauh lebih berharga dan tahan lama dibanding sekadar label politiknya. Oleh karena itu, ada baiknya pemerintah Swedia apa pun warna politik yang berkuasa ke depan tetap menjaga konsistensi antara komitmen normatif dan praktik kebijakan lain yang berkaitan, terutama pada titik-titik yang selama ini menjadi sorotan kritik, seperti kebijakan ekspor senjata. Bagi Uni Eropa, penelitian ini menyarankan agar mekanisme pemantauan implementasi GAP III di level

Delegasi UE dan negara anggota terus diperkuat, mengingat ditemukan kesenjangan antara desain kebijakan yang matang di level pusat dengan pelaksanaan yang belum sepenuhnya jelas di level operasional lokal.

### 5.2.3 Bagi Indonesia

Sebagai negara yang turut aktif mendorong agenda Women, Peace and Security lewat ASEAN, Indonesia bisa mengambil pelajaran dari pengalaman Swedia. Pertama, soal pentingnya membangun basis kerja sama regional yang kuat sebelum norma bisa didorong ke tingkat yang lebih luas sebagaimana solidaritas Nordik menjadi modal utama Swedia, ASEAN *Outlook on WPS* bisa diperkuat lewat kerja sama antarnegara anggota yang lebih terlembaga dan berkelanjutan, tidak sekadar dokumen deklaratif. Kedua, soal pentingnya "menitipkan" norma ke dalam struktur kelembagaan yang lebih permanen sebelum dukungan politik domestik berubah mengingat dinamika politik Indonesia yang juga bisa bergeser dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, penguatan kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri sebaiknya diarahkan untuk masuk ke mekanisme kelembagaan yang lebih sulit dibatalkan begitu saja, bukan semata bergantung pada prioritas satu menteri atau presiden tertentu. Ketiga, temuan soal bagaimana norma bisa ditolak sebagian pihak meski sudah disepakati secara kolektif mengingatkan Indonesia untuk tidak berasumsi bahwa dukungan formal terhadap agenda gender otomatis berarti implementasi yang mulus di seluruh lapisan pemerintahan maupun masyarakat.